

“Redupnya” Pesan dan “Menguatnya” Informasi: Refleksi Komunikasi Sebagai Sistem Seleksi

Nur Imroatus Sholikhah

Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
e-mail: nurimroatus@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap kajian komunikasi terkini. Arus informasi hadir dalam volume besar, tersebar cepat, dan tidak selalu dikemas dalam struktur pesan yang utuh. Tulisan ini mengajukan kebutuhan refleksi kajian komunikasi melalui dua pertanyaan, yakni: bagaimana eksistensi komunikasi dibangun dari struktur selain dalam logika transmisi pesan; dan sejauh mana kajian komunikasi yang bertumpu pada informasi mampu mereduksi kompleksitas masalah sosial yang dihadapi masyarakat modern. Refleksi dilakukan dengan melihat kembali perkembangan kajian komunikasi dengan mengacu pada tiga pemikiran: Harold Lasswell, Jürgen Habermas, dan Niklas Luhmann. Model Lasswellian ditantang terutama dalam konteks kesimpangsiuran pesan dan ketidakjelasan otoritas pengirim pesan. Rasionalitas komunikatif ala Habermas dihadapkan dengan logika algoritma dan ekspresi emosional yang menghidupi ruang media sosial. Sementara itu, pendekatan sistemik Luhmann justru menantang relevansi kajian komunikasi di era digital ketika informasi hadir tanpa sepenuhnya membutuhkan peran aktor manusia. Dalam konteks masyarakat informasi, komunikasi tidak selalu sebagai jembatan antarsubjek, melainkan juga sebagai sistem seleksi. Komunikasi berlangsung secara otonom melalui seleksi makna dalam sistem sosial dan terlepas dari “beban” kesadaran subjek. Pendekatan komunikasi sebagai sistem seleksi relevan terutama untuk memosisikan peran informasi dalam lanskap digital yang cenderung disruptif. Di tengah banjir informasi dan krisis makna, kajian komunikasi perlu bergerak melampaui paradigma lama, menuju pemahaman baru yang lebih kontekstual dan sistemik.

Kata kunci: masyarakat informasi, komunikasi digital, sistem seleksi, paradigma komunikasi, teori sistem

The “Decline” of Messages and the “Rise” of Information: Reflections on Communication as a Selection System

Abstract

The rapid development of digital technology has fundamentally transformed the landscape of contemporary communication studies. Information now circulates in large volumes, spread rapidly, and is often no longer structured within complete, coherent messages. This paper proposes the need for reflection through two questions:

(1) How the possibility of communication can be constructed through frameworks beyond the logic of message transmission; and (2) to what extent communication studies that emphasize information can contribute to reducing the complexity of social problems in modern society. This reflection revisits the evolution of communication studies by challenging three influential theoretical perspectives: Harold Lasswell, Jürgen Habermas, and Niklas Luhmann. The Lasswellian model is challenged especially in the context of message confusion and unclear authority of the message sender. Habermas' communicative rationality is confronted by the dominance of algorithmic logic and emotional expressions that permeate social media spaces. Meanwhile, Luhmann's systems theory raises further questions regarding the relevance of communication studies in the digital era, where information circulates autonomously, often without requiring the active involvement of human actors. Within the information society, communication is no longer solely a bridge between subjects but also operates as a selection system. Communication processes occur autonomously through the selection of meaning within the social system and decoupled from the 'burden' of individual consciousness. This approach to communication as a selection system is particularly relevant for positioning the role of information within the increasingly disruptive digital landscape. Amidst the information flood and a growing crisis of meaning, communication studies need to move beyond the traditional paradigm towards more contextualized and systemic frameworks.

Keywords: *information society, digital communication, selection system, communication paradigm, systems theory*

Pendahuluan

Dalam kajian komunikasi, informasi menjadi salah satu bagian penting bagaimana sebuah pesan menjadi bermakna untuk disampaikan. Informasi dalam pesan tidak dapat tersaji secara acak sehingga sebuah pesan sekaligus mencerminkan proses pengorganisasian informasi secara terstruktur yang memungkinkan pesan dipahami oleh penerimanya. Namun, seiring berkembangnya teknologi digital, informasi hadir dalam volume masif, tersebar luas tanpa selalu dibingkai dalam struktur pesan yang utuh. Dalam konteks ini, informasi tidak selalu membutuhkan pesan sebagai media penyampai. Cukup dengan data yang viral, visual yang kuat,¹ atau potongan narasi yang menggugah,² “informasi” dapat berinteraksi dengan sendirinya.

¹ Xiaoyu Ma dan Xu Fan, “A Review of the Studies on Social Media Images from the Perspective of Information Interaction,” *Data and Information Management* 6, no. 1 (1 April 2022): 100004, <https://doi.org/10.1016/j.dim.2022.100004>.

² Yang Feng, Chen Huan, dan Qian Kong, “An expert with whom I can identify: the role of narratives in influencer marketing,” *International Journal of Advertising* 40, no. 7 (3 Oktober 2021): 972–93, <https://doi.org/10.1080/02650487.2020.1824751>; Gerard J. Tellis dkk., “What Drives Virality (Sharing) of Online Digital Content? The Critical Role of

Konsekuensinya, komunikasi menjadi salah satu kajian yang perlu merefleksikan relevansinya dalam konteks masyarakat yang surplus informasi. Produksi pengetahuan masyarakat tumbuh melalui potensi jaringan informasi (*network society*), bahkan tanpa adanya “interaksi”.³ Cukup *scroll* konten beragam *platform* media sosial, maka kebutuhan *up to date* sudah terpenuhi. Masyarakat lebih tertarik pada pengetahuan yang diperoleh secara cepat keimbang melalui proses pengujian empiris dan ekperimentatif yang cenderung lama. Hal-hal terkait masa depan, pola-pola baru dalam pengambilan keputusan, maupun teknologi dengan kemampuan prediktif, sangatlah digemari.⁴

Refleksi kajian komunikasi menjadi penting, setidaknya untuk membuka dua diskusi. *Pertama*, diskusi terkait disonansi komunikasi dalam konteks digital yang ditandai dengan “lesunya” pesan dalam perannya mengorganisasi informasi. Hal tersebut cukup mengkhawatirkan, mengingat sebagian besar definisi komunikasi mengacu pada pendekatan transmisi “pesan”; dari si penyampai pesan kepada penerima pesan. Perkembangan kajian komunikasi bertumpu pada proses interpretasi pesan (*decode*) yang dianggap memengaruhi tindakan sosial. Di era informasi, transmisi pesan sulit berjalan tanpa “distraksi” karena pesan menyelinap dalam medium, menunggangi ataupun dikontrol oleh medium.⁵ Ketika medium jumlahnya tak bisa dihitung lagi seperti sekarang, si penyampai pesan maupun target audiens sulit dikenali dengan pasti. Tanpa kita sadari, pesan sudah tersaji di depan layar *gadget* kita. Pesan semacam ini kemungkinan besar sulit “dikendalikan”, “cenderung liar”, dan rentan terdistorsi.

Kedua, diskusi terkait kebangkitan informasi yang telah membentuk ekosistem masyarakat baru, yakni masyarakat yang membangun eksistensinya atas informasi. Masyarakat saat ini sangat tergantung pada *gadget* sebagai “dunia baru” yang membuat mereka menghidupi media sosial, menyambut

Information, Emotion, and Brand Prominence,” *Journal of Marketing* 83, no. 4 (1 Juli 2019): 1–20, <https://doi.org/10.1177/0022242919841034>.

³ Manuel Castells, *The Information Age, Volume I: The Rise of the Network Society* (Malden: Blackwell, 1996); Jarred Prier, “Commanding the trend: Social media as information warfare,” dalam *Information Warfare in the Age of Cyber Conflict* (London: Routledge, 2020).

⁴ Hill, Richard, “The Coming of Post Industrial Society,” *Insurgent Sociologist* 4, no. 3 (1974): 37–51.

⁵ Friederike Schultz, Sonja Utz, dan Anja Göritz, “Is the Medium the Message? Perceptions of and Reactions to Crisis Communication via Twitter, Blogs and Traditional Media,” *Public Relations Review* 37, no. 1 (1 Maret 2011): 20–27, <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2010.12.001>.

digitalisasi aktivitas sosial, maupun menanyakan hal-hal yang sangat intim kepada mesin-mesin *artificial intelligence* (AI). Masalahnya, pada saat yang sama kita mengeluhkan banyak isu sosial. Misalnya, ketika kemiskinan meningkat, kita kecewa dengan sistem politik, pendidikan, hukum, dan belum lagi soal kerusakan lingkungan. Diskusi kedua ini sekaligus mengantarkan pada pertanyaan: apa gunanya informasi sebanyak itu jika masyarakat tidak berdaya di hadapan masalah-masalahnya sendiri?

Refleksi kajian komunikasi yang saya maksud dalam judul tulisan kurang lebih akan menguraikan dua diskusi di atas. Saya akan membuka diskusi pertama dengan membahas perkembangan kajian komunikasi dalam tiga *landscape* pemikiran, yakni Harold Lasswell,⁶ Jürgen Habermas,⁷ dan Niklas Luhmann.⁸ Ketiganya mewakili perkembangan penting dalam evolusi pemikiran komunikasi. Lasswell dikenal dengan model komunikasinya yang bertumpu pada efektivitas penyampaian pesan dan menekankan fungsi komunikasi dalam menjaga ketertiban sosial. Habermas menyoroti aspek normatif komunikasi sebagai ruang publik untuk dialog rasional dan demokrasi. Sementara, Luhmann mengenalkan perspektif sistemik yang memandang komunikasi sebagai proses auto-referensial dalam sistem sosial yang kompleks.

Diskusi ini sekaligus mengantarkan pada diskusi kedua yang menjelaskan kajian komunikasi yang lebih mengandalkan peran-peran informasi dalam tradisi sibernetika. Dalam konteks tersebut, refleksi tentang kajian komunikasi adalah memastikan informasi seperti apa dan bagaimana informasi bisa terlibat mereduksi masalah sosial manusia. Diskusi ini akan mengajukan potensi komunikasi sebagai sistem seleksi yang dapat berfungsi mereduksi masalah-masalah dalam sistem sosial masyarakat modern. Komunikasi sebagai sistem seleksi sekaligus “meragukan” peran manusia (*human*) sebagai aktor sosial. Mengacu pada pemikiran Luhmann, manusia tidak dapat diandalkan dalam menyelesaikan masalah sosial karena mereka jugalah masalahnya. Manusia bisa berkhianat, sakit, meninggal, lupa, korup, bohong, dan penuh

⁶ Harold D. Lasswell, “The Structure and Function of Communication in Society,” *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi*, no. 24 (2007): 215–28. Pertama kali diterbitkan sebagai: Harold D. Lasswell, “The Structure and Function of Communication in Society,” dalam *The Communication of Ideas: A Series of Addresses*, ed. oleh Lyman Bryson (New York: Institute for Religious and Social Studies, 1948), 37–51.

⁷ Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action* (Boston: Beacon Press, 1984).

⁸ Niklas Luhmann, *Social Systems* (Stanford: Stanford University Press, 1995).

dengan ketidakpastian. Diskusi ini sekaligus akan menegaskan bahwa sejak awal, tradisi komunikasi sebagai sistem transmisi pesan yang mengandalkan aktor manusia sudah bermasalah.

Diskusi 1: Tiga Perspektif Komunikasi sebagai Ilmu Sosial

Dalam berbagai buku pengantar, ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu “baru diakui” seiring dengan perkembangan teknologi mesin cetak dan media komunikasi analog, seperti radio dan televisi.⁹ Akan tetapi jauh sebelumnya, Istilah retorika yang merujuk pada pemikiran Aristoteles telah menjadi rujukan penting dalam tradisi komunikasi persuasif, terutama dalam konteks propaganda dan diseminasi informasi. Dalam retorika, transmisi pesan dari penyampai kepada si penerima pesan dipelajari sebagai kajian seni memengaruhi.

Sejak saat itu, bagaimana membuat sebuah pesan menjadi penting atau tidak membuka diskursus tersendiri. Kajian komunikasi menjadi “terobsesi” pada dampak pesan terutama sejauh mana sebuah pesan memengaruhi kehidupan sosial. Harold Lasswell dalam karyanya, “*The Structure and Function of Communication in Society*” melihat komunikasi dapat berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat dalam konteks kewarganegaraan.¹⁰ Pemikiran Lasswell menjadi salah satu yang cukup kuat memengaruhi perkembangan kajian komunikasi. Meskipun telah berkembang banyak teori dan pendekatan komunikasi, model Lasswell masih menjadi rujukan utama pengantar kajian komunikasi dalam berbagai literatur akademik. Model Lasswell tetap dikutip sebagai model dasar yang membantu menjelaskan elemen fundamental komunikasi.¹¹

Menurut Lasswell, ada tiga fungsi yang melekat pada spirit komunikasi, yakni pengawasan ekosistem sosial, korelasi dengan bagian-bagian masyarakat

⁹ Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication: Tenth Edition* (Long Grove: Waveland Press, 2010); John Fiske, *Introduction to Communication Studies*, 3 ed. (London: Routledge, 2010), <https://doi.org/10.4324/9780203837382>.

¹⁰ Lasswell, “The Structure and Function of Communication in Society,” 2007.

¹¹ Zachary S. Sapienza, Iyer, Narayanan, dan Aaron S. and Veenstra, “Reading Lasswell’s Model of Communication Backward: Three Scholarly Misconceptions,” *Mass Communication and Society* 18, no. 5 (3 September 2015): 599–622, <https://doi.org/10.1080/15205436.2015.1063666>.

kat dalam menanggapi perkembangan ekosistem, dan transmisi warisan sosial ke generasi berikutnya. Ketiga fungsi tersebut diajukannya dengan melihat bagaimana komunikasi menjadi bagian dari lapisan-lapisan proses kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial dan menjadi bagian dari dunia, kepekaan manusia terhadap lingkungan menjadi bentuk dari tindakan pengawasan pada segala kemungkinan yang dapat merugikan sistem sosial. Misalnya saja, komunikasi para diplomat ataupun politisi elit mengambil peran sebagai pengawas lingkungan; para jurnalis menjadi penghubung satu bagian dengan bagian lain dalam masyarakat; dan para pendidik melakukan transmisi atas nilai ataupun warisan pengetahuan pada generasi selanjutnya.¹²

Lasswell menggambarkan komunikasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: “Siapa?”, “Mengatakan apa?”, “Melalui saluran yang mana?”, “Kepada siapa?”, dan “Dengan efek seperti apa?”. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dikenal sebagai unsur-unsur pembentuk struktur komunikasi dan menjadi model komunikasi Lasswellian.¹³ Dalam konteks komunikasi era digital, kerangka Lasswell banyak digunakan untuk memahami struktur komunikasi di media sosial. Misalnya, penelitian tentang komunikasi politik digital masih menggunakan elemen-elemen “siapa yang berbicara” (aktor politik, *buzzer*), “apa pesannya” (narasi kebijakan, isi postingan), “salurannya” (beragam platform media sosial), dan “efeknya” (seperti: polaritas, partisipasi pemilih) sebagai kerangka analisis.

Model Lasswell di atas menegaskan bahwa fungsi komunikasi bergantung dari konduktansi yang terjadi dalam proses transmisi. Semakin minim konduktansi, impuls syaraf menjadi lemah dan membuat tindakan pengawasan, pengkoordinasian, maupun pewarisan menjadi lemah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengaktifkan sirkuit komunikasi, baik dengan satu arah, maupun timbal balik antara komunikator dengan audiens.¹⁴ Untuk memastikan kekuatan pesan, proses komunikasi juga ditujukan untuk mempertahankan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Lasswell menyebut komunikasi efisien dengan melihat sejauh mana penilaian rasional difasilitasi dalam proses transmisi pesan. Menurutnya, transmisi pesan yang melibatkan penilaian rasional mengimplementasikan tujuan nilai.¹⁵ Sebaliknya, komuni-

¹² Lasswell, “The Structure and Function of Communication in Society,” 2007, 216–17.

¹³ Lasswell, 216.

¹⁴ Lasswell, 220.

¹⁵ Lasswell, 223.

kasi bisa tidak efisien disebabkan adanya distorsi yang berasal dari nilai-nilai kekuasaan, kekayaan, dan rasa hormat.¹⁶

Ancaman pada efisiensi komunikasi ini dijawab oleh Lasswell dengan mengajukan perbedaan antara pesan untuk kelompok yang diperhatikan (*attention aggregates*) dengan publik (*publics*). Menurutnya, setiap orang tidak secara otomatis menjadi bagian dari publik meskipun menjadi kelompok yang diperhatikan. Untuk menjadi kelompok yang diperhatikan, cukup dikenali dengan referensi simbol umum seperti sebagai warga negara. Namun, untuk dapat disebut “publik”, seseorang harus terlibat dalam aktivitas kepublikan seperti misalnya terlibat dalam aktivitas politik atau melakukan tindakan yang dapat memengaruhi kehidupan sebuah negara.¹⁷

Meskipun demikian, Lasswell juga menjelaskan adanya sentimen kelompok yang juga perlu diperhatikan, untuk tidak buru-buru menyebutnya sebagai kepentingan publik. Hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan publik harus diperhatikan karena kerentanan adanya distorsi nilai dari sentimen kelompok. Kecenderungan ini biasanya muncul dimulai dari saat melihat sebuah kelompok untuk diperhatikan. Kelompok yang kuat cenderung memperhatikan kelompoknya sendiri dan cenderung kurang memperhatikan kelompok yang lemah.

Konsep komunikasi sebagai penguatan pesan publik secara khusus menekankan pada peran-peran aktor dengan tanggung jawab kepublikan, seperti misalnya pemerintah atau kelompok *stakeholder* dengan kemampuan memperkuat tersampainya pesan publik. Hal yang sama juga menjadi *spirit* John Dewey dalam tulisannya, *The Public and Its Problems*.¹⁸ Menurutnya, eksistensi negara dan instrumen-instrumennya adalah dalam rangka menyelenggarakan kebutuhan publik. Artinya, komunikasi bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan emosional agar dimengerti orang lain, tetapi juga tentang bagaimana untuk memenuhi kebutuhan publik oleh pemerintah.

Dalam konteks tersebut, komunikasi publik menekankan pada tanggung jawab negara dan berlaku untuk semua bentuk negara, bahkan yang menganut sistem non-demokratis. Dewey menolak komunikasi publik dalam kaitannya untuk mencari solusi atau alat negosiasi dalam situasi konflik. Menurutnya, urusan publik (*public goods*) sangat khusus dan dalam beberapa hal

¹⁶ Lasswell, 225.

¹⁷ Lasswell, 226.

¹⁸ John Dewey, *The Public and Its Problems: An Essay in Political Inquiry* (Athens: Swallow Press, 2016).

sangat politis. Komunikasi adalah sarana untuk menciptakan perasaan sosial dan mengikat orang-orang menjadi satu kesatuan yang tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan terkait urusan publik.¹⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, kajian komunikasi bergerak dari sistem transmisi pesan menuju komunikasi sebagai tindakan (*action*). Jürgen Habermas melalui karyanya, *The Theory of Communicative Action*, mengajukan komunikasi sebagai tindakan rasional komunikatif (*communicative action*).²⁰ Ia mengkritik tradisi komunikasi, termasuk yang dijelaskan oleh Lasswell, yang mengasumsikan komunikasi sebagai tindakan rasional, tetapi sekadar instrumentatif, yang fungsi utamanya untuk mencapai tujuan. Menurutnya, komunikasi bisa berperan lebih besar dalam menguatkan kepentingan publik dengan cara membuka potensi ruang kesetaraan, seperti dialog, mengembangkan model-model interaksi, maupun potensi saling memahami dalam konteks masyarakat demokratis.

Dengan melihat potensi pengembangan dalam tradisi linguistik, Habermas mengembangkan teori yang mendorong subjek untuk melihat kompetensi bahasa yang mendukung kompetensi komunikasi dalam interaksi sosial. Mengacu pada konsep kemampuan bahasa (*linguistic competence*) dari Noam Chomsky, Habermas membedakan antara universal semantik yang memproses pengalaman dan yang memungkinkan pemrosesan awal sebelum adanya pengalaman (*apriori*). Hal ini karena beberapa makna ternyata bersifat intersubjektif universal. Artinya, makna tersebut ditetapkan pada struktur yang berkembang dengan tingkat budaya komunikasi linguistik itu sendiri, yang disebut oleh Habermas sebagai kompetensi komunikasi (*communicative competence*).²¹

Perbedaan signifikan antara rasionalitas instrumental dengan rasionalitas komunikatif adalah pada ruang kebebasan yang disediakan dalam bahasa. Menurut Habermas, rasionalitas komunikatif berpeluang untuk membebaskan diri dari represi, karena jika bahasa direpresi maka tidak akan terjadi komunikasi. Rasionalitas komunikatif dapat dilihat dari potensinya untuk membuat kejelasan atas segala sesuatu, antara mana yang benar dan salah. Komunikasi

¹⁹ Amy J. Cohen, "Producing Publics: Dewey, Democratic Experimentalism, and the Idea of Communication," *Contemporary Pragmatism* 9, no. 2 (21 April 2012): 143–44, <https://doi.org/10.1163/18758185-90000234>.

²⁰ Habermas, *The Theory of Communicative Action*.

²¹ Jürgen Habermas, "Towards a theory of communicative competence," *Inquiry* 13, no. 1–4 (1970): 363, <https://doi.org/10.1080/00201747008601597>.

yang mampu membuat terang tentu saja dibangun dari kejujuran serta ketepatan dalam penyampaiannya.

Rasionalitas komunikatif dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan dengan adanya kebutuhan interaksi dan berbicara tentang berbagai tema secara bebas. Namun, dalam ruang-ruang hegemonik seperti rapat kenegaraan, media pemerintah, ataupun ruang-ruang yang berada dalam spektrum “kontrol” penguasa, rasionalitas komunikatif ini tidak tumbuh. Rasionalitas komunikatif justru tumbuh dalam ruang-ruang keseharian seperti di kafe-kafe, taman, pasar, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Habermas mengajukan konsep ruang publik (*public sphere*) sebagai ruang yang dapat mengaktifkan rasionalitas komunikatif terkait tema-tema publik yang tidak dapat mudah dibicarakan dalam ruang-ruang hegemonik. Ruang publik dipahami sebagai ruang yang dimiliki oleh publik. Konsep ini secara khusus untuk menunjukkan kekuasaan publik pada ruang publik.

Salah satu yang menjadi rujukan Habermas sebagai ruang publik adalah media. Melalui media, publik dapat berpartisipasi memberikan pendapatnya dalam isu-isu tertentu. Di media, pendapat para politisi dapat dibantah oleh akademisi, kebijakan pemerintah dikritik oleh aktivis, serta dalam tema-tema tertentu setiap narasumber memberikan pendapat secara setara. Hal ini membuat media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi membuka ruang runting bagi berbagai entitas publik yang terlibat di dalamnya. Dengan cara ini, masyarakat secara partisipatif dapat terlibat dalam berbagai urusan kehidupan sosialnya.

Dalam konteks komunikasi era digital, asumsi dasar tindakan komunikatif mendapat sejumlah tantangan serius. Ruang komunikasi publik kini dimediasi oleh *platform* digital yang bekerja berdasarkan logika algoritmik.²² Komunikasi di media sosial sering kali tidak terjadi dalam kerangka deliberatif, tetapi dalam bentuk ekspresi afektif yang cepat, terfragmentasi, dan terpisah dari struktur argumen yang koheren. Akibatnya, alih-alih membangun konsensus, interaksi digital cenderung memperkuat polarisasi dan reproduksi bias. Selain itu, dominasi visual, kecepatan, dan viralitas telah menggantikan rasionalitas sebagai fondasi utama komunikasi digital.

Jika dibuat ringkasan, Lasswell menekankan tentang bagaimana komunikasi publik dilihat sebagai upaya penyebaran pesan yang menguatkan

²² Tarleton Gillespie, *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media* (New Haven: Yale University Press, 2018).

kepentingan publik, sementara Habermas meletakkan komunikasi sebagai gerakan memperkuat deliberasi. Keduanya sama-sama bertumpu pada subjek atau aktor manusia yang akan menyampaikan pesan dan menerima pesan. Tanpa aktor atau subjek-subjek tersebut, komunikasi akan kehilangan tujuannya. Niklass Luhmann melalui karyanya, *Social System* justru melihat kemungkinan perubahan sosial melalui selain manusia, yakni komunikasi.²³ Komunikasi diletakkan Luhmann sebagai sistem operasi dari sistem sosial. Komunikasi didefinisikannya sebagai sistem seleksi informasi (*information*), pengungkapan (*utterance*), dan pemahaman (*understanding*). Luhmann menolak definisi komunikasi sebagai sistem transmisi pesan, karena *sender* tidak kehilangan apa-apa dalam dirinya dan *receiver* mengambil yang diperlukan saja.

Manusia dalam interaksi sosial direduksi perannya oleh Luhmann hanya ketika berkomunikasi. Sekali lagi, komunikasi yang dimaksud Luhmann bertumpu pada proses seleksi informasi, pengungkapan, dan pemahaman. Ketiganya dalam “satu tarikan nafas”, tidak dapat dipisah-pisah. Komunikasi hanya dapat disebut komunikasi jika ada informasi yang diungkapkan dan mengundang pemahaman yang ditandai dengan adanya respons balik. Jika seseorang bicara tapi tidak ada informasi, orang tersebut tidak dapat disebut sedang berkomunikasi. Bisa saja orang merasa apa yang disampaikan sebagai informasi, tetapi jika tidak ada respons balik, maka itu juga tidak dapat disebut komunikasi. Dengan cara ini, Luhmann sekaligus membedakan komunikasi dengan selain komunikasi. Kebahasaan manusia hanya dapat disebut sebagai komunikasi ketika menghasilkan kebermaknaan bagi sistem sosial.

Premis Luhmann tentang eksistensi komunikasi tersebut “tidak mudah” dipahami, terutama bagi yang meyakini komunikasi yang mengandalkan tindakan aktor. Luhmann bahkan secara khusus mengkritik konsep Habermas tentang tindakan komunikatif, yang dianggap “mengada-ada”. Bagi Luhmann, tindakan komunikatif merupakan upaya sia-sia karena mencoba memotivasi subjek melalui rasionalitasnya untuk menghidupi ruang publik. Sementara, rasionalitas yang subjektif memiliki dimensi psikologis yang bersifat individu dan tidak bisa dipastikan menggerakkan tindakan yang sama.²⁴

²³ Luhmann, *Social Systems*.

²⁴ Kenneth C. Bausch, “The Habermas/Luhmann Debate and Subsequent Habermasian Perspectives on Systems Theory,” *Systems Research and Behavioral Science* 14, no. 5 (1997): 317, [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1743\(199709/10\)14:5<315::AID-SRES173>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1743(199709/10)14:5<315::AID-SRES173>3.0.CO;2-Z).

Komunikasi bagi Luhmann adalah penggerak sistem sosial yang berfungsi mereduksi kompleksitas sosial itu sendiri. Luhmann mengajukan konsep sistem sosial dengan sistem operasi komunikasi terutama untuk mengkritik pendekatan sosiologi yang ada. Menurutnya, “kegagalan” dari pendekatan sosiologi adalah ketidakmampuannya memberikan “solusi” atas kehidupan sosial, karena selalu meletakkan kehidupan sosial bersama-sama dengan masalah sosial yang dihadapinya.²⁵ Luhmann meletakkan kehidupan sosial sebagai sistem yang menjamin keberlangsungan kehidupan sosial, sehingga harus dibedakan secara tegas dengan masalah yang mengancam keberlangsungannya. Masalah dari sistem sosial diletakkan Luhmann sebagai lingkungan.

Sistem sosial yang diajukan Luhmann terutama untuk menjawab problematika masyarakat modern yang terus mengupayakan kestabilan di tengah kompleksitas dan ketidakpastian yang dihadapinya. Oleh sebab itu, sistem sosial, seperti sistem sel yang secara *autopoiesis* (merefensi dirinya sendiri) merespons “ancaman” dari lingkungannya. Proses referensi-diri akan merefleksikan mana saja yang memperkuat atau melemahkan sistem. Sebagai contohnya, sistem hukum yang mampu merefensi diri dengan baik, memiliki kemampuan reflektif untuk menyeleksi hal-hal apa saja di luar hukum yang bisa mengganggu tercapainya keadilan. Demikian juga sistem media akan kuat ketika proses referensi dirinya mampu menyeleksi mana yang informasi dan yang bukan informasi.

Secara umum, masyarakat modern terbangun dalam beragam sistem yang spesifik dengan perbedaan fungsi sistem satu dengan lainnya. Sistem yang tidak bisa dibedakan dengan lainnya, juga secara otomatis kehilangan fungsinya. Pada saat yang sama, setiap sistem dapat menjadi lingkungan untuk sistem lainnya. Sistem pendidikan misalnya, kompleksitasnya bisa saja berasal dari sistem politik atau sistem ekonomi. Sistem agama bisa juga menjadi lingkungan yang membawa kompleksitas bagi sistem politik. Kuat tidaknya sistem-sistem tersebut akan ditunjukkan dari kemampuannya merefensi-diri saat berinteraksi dengan lingkungan dari waktu ke waktu.

Konsekuensinya, kemampuan sistem merefensi-diri sangat tergantung sebanyak apa stok pemaknaan yang dimilikinya. Siapa/apakah yang mampu memproduksi stok pemaknaan sistem? Di sinilah Luhmann mengandalkan komunikasi. Menurutnya, komunikasi sudah teruji selalu hadir dalam berbagai realitas sosial, sehingga kestabilannya dapat diandalkan sebagai operasi sistem ketika berinteraksi dengan lingkungan. Komunikasi sebagai sistem se-

²⁵ Luhmann, *Social Systems*, xlv.

leksi menghasilkan mekanisme refleksi yang memproduksi dan mereproduksi makna. Dalam hal ini, Luhmann mengacu pada pemikiran Edmund Husserl tentang fenomenologi transenden yang mana gejala sosial termasuk sistem sosial adalah sesuatu yang disengaja. Luhmann menyebut kesengajaan ini dilakukan bukan oleh kognitif saja, tetapi juga oleh komunikasi. Hubungan kognisi dan komunikasi ini berada dalam operasi seleksi pemahaman.²⁶ Pemaknaan inilah yang membuat perbedaan komunikasi publik dengan selain komunikasi publik.

Artinya, referensi-diri sistem sosial dapat berjalan melalui tiga dimensi. *Pertama*, saat sistem berinteraksi dengan lingkungan melalui komunikasi atau disebut sebagai dimensi sosial. *Kedua*, dimensi sistem mengupayakan keberlangsungannya secara evolutif dari waktu ke waktu atau disebut dimensi temporal. *Ketiga*, dimensi yang membuat sistem mampu membedakan diri dengan sistem lainnya, atau disebut juga dimensi fungsional. Ketiganya, berlangsung pada saat sistem melakukan referensi-diri. Setiap dimensi bermakna hanya dalam kombinasi dengan dua dimensi lainnya. Dimensi fungsional menghasilkan perbedaan antara sistem dan lingkungan. Dimensi temporal menghasilkan perbedaan antara masa lalu dan masa depan. Dimensi sosial menghasilkan perbedaan antara Ego dan Alter.²⁷

Secara otomatis, komunikasi dalam perspektif Luhmann membuat pesan menjadi tidak relevan disebabkan tidak relevannya manusia sebagai “aktor sosial”. Teori Luhmann tentu menuai kritik dari berbagai pihak, terutama sosiologi kritis. Fuchs dan Hofkirchner secara khusus menulis artikel berjudul “Autopoiesis and Critical Social Systems Theory” yang dimulai dengan premis, apakah sistem sosial melakukan *autopoiesis*?²⁸ Menurut teori Luhmann, yang menganggap manusia sebagai pengamat luar sistem sosial, melupakan kritik pada teori fungsionalisme yang memandang sejarah tanpa subjek, justru didorong oleh kekuatan di luar keberadaan para aktor yang

²⁶ Jakob Arnoldi, “Sense making as communication,” *Soziale Systeme* 16, no. 1 (2010): 31–31, <https://doi.org/10.1515/sosys-2010-0103>.

²⁷ Daniel Lee, “The Society of Society: The Grand Finale of Niklas Luhmann,” *Sociological Theory* 18, no. 2 (1 Juli 2000): 325, <https://doi.org/10.1111/0735-2751.00102>.

²⁸ Christian Fuchs dan Wolfgang Hofkirchner, “Autopoiesis and Critical Social Systems Theory,” dalam *Autopoiesis in Organization Theory and Practice*, ed. oleh Rodrigo Magalhães dan Ron Sanchez (Bingley: Emerald, 2009), 111–29.

sama sekali tidak mereka sadari.²⁹ Ketidakhadiran aktor justru memberi kesan bahwa sistem bagi Luhmann adalah kekuatan eksternal.

Kritik Fuchs dan Hofkirchner terhadap Luhmann dibangun dari kenyataan bahwa perubahan sosial (*social change*) yang kuat merupakan kiprah dari aktor-aktor yang melakukan gerakan sosial yang kuat. Pemikiran Luhmann mendikotomikan sosial dan individu dengan hampir tidak memberikan perhatian pada tindakan sosial individu yang mengacu pada atau dibentuk oleh struktur sosial dan, pada gilirannya, justru melanggengkan dan mereproduksi struktur tersebut. Argumen keduanya juga mengutip perdebatan antara Luhmann dan Habermas, dengan menyebut Luhmann mengabaikan dimensi intersubjektif dan demokratis dalam hubungan sosial, yaitu bahwa konsensus dan partisipasi dapat dicapai melalui tindakan komunikatif yang memenuhi empat klaim validitas, yaitu kebenaran (*truth*), bisa dipercaya (*truthfulness*), baik secara sosial (*rightness*), dan komprehensif (*comprehensibility*). Menurut pandangan Luhmann, yang menganggap masyarakat modern terlalu kompleks untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang bersifat diskursif, membuatnya buta terhadap permasalahan sosial dan kepentingan kemanusiaan.³⁰

Sorotan ilmuwan sosial pada pengabaian aktor menjadi topik utama kritik terhadap teori Luhmann. Pada dasarnya, teori Luhmann sejak awal telah menegaskan bahwa sistem sosial tidak bermaksud mengabaikan masalah ataupun apa yang disebut sebagai kritik sosial. Luhmann justru mengingatkan bahwa dalam sistem sosial yang bergantung pada aktor, sistem akan berhadapan dengan masalah aktor, seperti: kematian, perubahan pemikiran, sifat rakus, berkhianat, dan sebagainya. Sementara, ketidakpastian yang dihadapi masyarakat modern sebagian besar ditimbulkan oleh ketidakpastian aktor. Ketidakpastian aktor dapat dilihat dari fenomena politisi yang semasa kampanye intens menyuarakan suara rakyat, tetapi saat menjadi bagian kekuasaan justru merumuskan kebijakan yang menyulitkan masyarakat. Politisi semacam ini membuat kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap kekuasaan yang berpihak pada rakyat menjadi turun.

Sebagai gantinya, Luhmann meletakkan keberlangsungan sistem mengacu pada kode sistem sehingga sebuah sistem dapat dengan jelas dibedakan dan membedakan dirinya dengan sistem lainnya (lingkungan). Kode sistem politik misalnya, terdiri dari kode biner berkuasa/oposisi. Kode sistem terse-

²⁹ Fuchs dan Hofkirchner, 113.

³⁰ Fuchs dan Hofkirchner, 115.

but membedakan sistem politik dengan sistem ekonomi (kode: untung/rugi), sistem seni (kode: indah/jelek), dan sebagainya. Sistem politik ber-*autopoiesis* melalui komunikasi yang memproduksi pemaknaan tentang berkuasa maupun oposisi. Sistem politik akan menyusut ketika sistem mereferensi pengalaman kebermaknaan di luar sistem, seperti misalnya pemaknaan ekonomi, yang membuat makna kekuasaan/oposisi dikaitkan dengan untung/rugi.

Pandangan Luhmann pada “kode sistem” tersebut membuka ruang baru dalam berbagai bidang kajian yang cukup “mapan”, seperti misalnya hukum, ekonomi, politik, organisasi, seni, agama, dan sebagainya. Meskipun pada saat yang sama, optimisme pengembangan tersebut disertai dengan beberapa konteks dan catatan. Neves,³¹ misalnya, melihat pentingnya penekanan pada kode sistem yang menjadi acuan refleksi dan refleksivitas proses *autopoiesis* dalam kajian sistem hukum. Dalam artikelnya, Naves menjelaskan bagaimana masalah dalam kajian hukum modern disebabkan dominasi refleksi yang justru bukan dari kode sistem hukum. Luhmann menyebut kode sistem hukum adalah kode biner legal/ilegal. Akan tetapi, dalam praktiknya, sistem hukum, terutama yang terjadi di negara berkembang, alih-alih mengembangkan refleksivitas pada pemaknaan tentang legal/ilegal, justru mengembangkan pemaknaan misalnya tentang etika, kekuasaan, dan sebagainya. Secara khusus, Naves menunjukkan dominasi reproduksi pemaknaan yang diciptakan oleh berbagai faktor sosial, seperti uang, kekuasaan, dan kepentingan yang menjadikan *autopoiesis* sistem hukum tidak dapat beroperasi dengan baik.³²

Dalam penjelasan saya terkait tiga perspektif komunikasi di atas, pembaca mungkin bisa melihat ketertarikan saya secara khusus pada pendekatan komunikasi dalam perspektif Luhmann. Ketertarikan saya terutama pada teori tersebut dilatarbelakangi adanya fenomena yang saya sampaikan pada awal tulisan, yakni masyarakat saat ini berada dalam kondisi surplus informasi tetapi pada saat yang sama masalah sosial yang dihadapinya semakin kompleks. Apakah informasi-informasi tersebut tidak mampu menghasilkan pemaknaan yang membantu sistem berefleksi?

Saya kira cukup menantang untuk mencoba mengambil alternatif kajian komunikasi yang tidak “bergantung” pada manusia. *Toh*, saat informasi datang di layar *gadget* kita, siapa yang mem-*posting* sudah tidak terlalu penting, kecuali kita sedang mencurigainya sebagai disinformasi atau *fake news*.

³¹ Marcelo Neves, “From the Autopoiesis to the Allopoiesis of Law,” *Journal of Law and Society* 28, no. 2 (2001): 242–64, <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00188>.

³² Neves, 242–43.

Saat ini, kita juga melihat pertumbuhan *influencer* yang ditentukan bukan dari “status sosialnya” melainkan dari kemampuannya memproduksi informasi yang relevan dengan pemahaman publik.

Dengan kecenderungan di atas, saya bermaksud membawa pada diskusi selanjutnya, yakni bagaimana konsep Luhmann tentang kemampuan sistem mereferensi-diri secara operasional memastikan kemampuan adaptif sistem tetap berfungsi, terutama tentang bagaimana sistem merespons pertumbuhan informasi yang pesat tetapi juga mampu menyeleksi yang berguna buat sistem dan tidak menambah masalah bagi sistem. Secara khusus, saya akan membahas tentang bagaimana kajian pembentukan sistem melalui komunikasi sebagai pemrosesan informasi dalam kajian organisasi.

Diskusi 2: Komunikasi dan “Ketahanan” Sistem Sosial

Saya menyadari diskusi bagian ini banyak meminjam gagasan Luhmann tentang komunikasi sebagai operasional sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, komunikasi dalam pendekatan Luhmann bukan dalam mekanisme sistem transmisi pesan, melainkan sistem seleksi tiga komponen, yakni informasi, pengungkapan, dan pemahaman. Dalam hal ini, komunikasi memiliki kemampuan untuk “menguatkan” atau “melemahkan” sistem, tergantung sebaik apa proses seleksi dilakukan sistem.

Lantas, bagaimana komunikasi dapat memperkuat fungsi sistem? Untuk menjelaskan pertanyaan ini, saya perlu sedikit menguraikan bagaimana Luhmann menggunakan fungsionalisme Talcott Parsons dalam membangun teorinya. Fungsionalisme digunakan Luhmann terutama untuk membangun argumen, sama dengan Talcott Parsons, yang menegaskan bahwa fungsi “lebih penting” daripada struktur.³³ Baik Parson maupun Luhmann, keduanya menggunakan konsep kontingensi ganda (*double contingency*) untuk menunjukkan kemampuan adaptif sistem atas perubahan lingkungan. Meskipun demikian, Luhmann mengkritik fungsionalisme Parsons terutama pada penerapan konsep kontingensi ganda tersebut.

Dalam karya Parsons, “kontingen” sebagian besar digunakan dalam arti “bergantung pada” yang mengacu pada ketergantungan ego dan mengubah

³³ Consuelo Vásquez dan Rubén Dittus Benavente, “Revisiting Autopoiesis: Studying the Constitutive Dynamics of Organization as a System of Narratives,” *Management Communication Quarterly* 30, no. 2 (1 Mei 2016): 270, <https://doi.org/10.1177/0893318915620492>.

ekspektasi dan tindakan. Sementara itu, Luhmann kembali ke interpretasi asli tentang kontingensi dalam teori modal (Aristoteles) yang menggambarkan “sesuatu yang diberikan” (sesuatu yang dialami, diharapkan, diingat, difantasikan) dengan mengingat kemungkinan sebaliknya. Artinya, tindakan ego tidak bergantung pada aktor lain secara mutlak, melainkan ketergantungan yang bersifat sementara dari serangkaian pilihan alternatif. Menurutnya, interaksi sosial bukanlah sebuah konsekuensi dari ketergantungan timbal balik antara ego dan perubahan, tetapi setidaknya dari konfrontasi dua sistem otonom yang membuat pilihannya sendiri sehubungan dengan satu sistem lain.³⁴

Sementara itu, kontingensi ganda bagi Luhmann merupakan mekanisme adaptasi sistem dengan mengonstruksi realitas dan mekanisme referensi diri secara bertingkat. Hal ini mengacu pada asumsi Luhmann bahwa sistem mengembangkan diferensiasi dengan lingkungan melalui pengamatan atas pengamatan yang diamati (*observations of the observed observer*).³⁵ Kemampuan adaptif sistem berarti sistem mampu membangun tatanan tingkat kedua (*second order*) dari tatanan sebelumnya secara berkelanjutan atau evolutif.

Konsep ‘pemaknaan’ dalam sistem *autopoiesis* (referensi-diri) dipahami sebagai dimensi komunikasi yang menghubungkan sistem dengan tatanan yang dibangun sebelumnya melalui pemaknaan-pemaknaan yang tumbuh dalam proses komunikasi. Pemaknaan, menurut Luhmann, merupakan *co-represent* dari dunia dan masyarakat yang disusun melalui sistem pemaknaan tersebut. Luhmann kurang tertarik masalah umum kausalitas dan reduksionisme. Teori Luhmann lebih spesifik pada ranah sosial yang tersusun atas makna dan komunikasi.³⁶ Dengan kata lain, setiap komunikasi saling bergantung dan ditentukan (dalam arti non-kausal) oleh makna yang diungkapkan dalam komunikasi lain; sehingga makna yang diberikan komunikasi dihasilkan dari hubungannya dengan komunikasi lain.³⁷

Salah satu contoh bagaimana pemaknaan yang muncul dalam komunikasi yang sistemik adalah pada sistem Hubungan Masyarakat/PR (*public re-*

³⁴ Raf Vanderstraeten, “Parsons, Luhmann and the Theorem of Double Contingency,” *Journal of Classical Sociology* 2, no. 1 (1 Maret 2002): 84, <https://doi.org/10.1177/1468795X02002001684>.

³⁵ Niklas Luhmann, *Introduction to Systems Theory*, ed. oleh Dirk Baecker, trans. oleh Peter Gilgen (Cambridge: Polity, 2013), 111.

³⁶ Dave Elder-Vass, “Luhmann and Emergentism: Competing Paradigms for Social Systems Theory?,” *Philosophy of the Social Sciences* 37, no. 4 (1 Desember 2007): 413, <https://doi.org/10.1177/0048393107307660>.

³⁷ Elder-Vass, 422–23.

lations) dikaji oleh Susanne Holmström.³⁸ Holmström melihat perkembangan PR berupaya mengatasi masalah yang mengacu pada “perbedaan-perbedaan” dalam relasi/hubungan. Lingkungan PR akan mengiritasi dengan menambah kompleksitas pada perbedaan. Komunikasi dalam hal ini menghubungkan sistem dengan lingkungan sehingga sistem dapat mereferensi pengalamannya sendiri dalam merespons kompleksitas yang datang dari lingkungan. Oleh sebab itu, adaptasi sistem PR dibangun melalui upaya-upaya memperkecil perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam hubungan. Berhasil tidaknya masalah-masalah “relasi” direduksi oleh sistem PR ditentukan sebanyak apa sistem memiliki pengalaman soal “mengatasi masalah perbedaan” itu sendiri.

Pada masa awal, kontingensi ganda sistem PR dengan lingkungan merefleksikan “kepentingan bersama” sebagai fungsi PR mereduksi kompleksitas makna “perbedaan” dalam relasi. Informasi menjadi tumbuh dalam komunikasi melalui pemaknaan tentang “kepentingan bersama”. Meskipun kemudian, lingkungan juga mengembangkan pemaknaan yang dekat dengan “kepentingan bersama”, yakni “kepentingan publik”. Sistem PR pada gilirannya menghadapi kompleksitas baru, yakni semampu apa sistem PR mengomunikasikan perbedaan fungsi antara “kepentingan bersama” dengan “kepentingan publik”. Sementara itu, pada saat bersamaan, sistem PR juga menghadapi kompleksitas yang datang dari “kepentingan publik” yang tumbuh bersama dengan pemaknaan tentang “perspektif publik” dan “opini publik”. Belum lagi, ketika kompleksitas “opini publik” mengiritasi sistem PR dengan pemaknaan tentang risiko reputasi, secara simultan kompleksitas sistem PR bertambah dengan pemaknaan sistem PR yang memaknai “ketakutan” turunnya reputasi.³⁹

Konsekuensinya, sistem PR bukannya semakin sederhana, malah semakin kompleks. Hal ini ditunjukkan bagaimana sistem PR berupaya memaknai budaya, psikologi, bahkan strategi politik, sebagai upaya “mendekatkan perbedaan”. Menurut Holmström, sistem PR perlu mengembangkan kemampuan referensi-diri melalui pemaknaan risiko relasi. Sistem PR dapat mengembangkan pemaknaan bahwa “perbedaan” atau “konflik” bukanlah kegagalan relasi, melainkan konsekuensi dari relasi itu sendiri. Dengan pemaknaan ini, sistem PR mengomunikasi bukanlah memproduksi informasi untuk menghasilkan konsensus, tetapi risiko relasi. Masyarakat modern (terutama pasca-

³⁸ Susanne Holmström, “Niklas Luhmann: Contingency, Risk, Trust and Reflection,” *Public Relations Review* 33, no. 3 (2007): 255–62, <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2007.05.003>.

³⁹ Holmström, 257.

1900-an) memilih bentuk-bentuk protes yang digunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuan, kebebasan berpendapat, transparansi, ataupun membuka pemaknaan baru untuk mereduksi “ketidaktahuan” dalam menyampaikan pendapatnya. Itulah mengapa, pada saat yang sama, refleksi diri sistem PR pada risiko ditentukan juga bagaimana komunikasi sistem dapat menyeleksi iritasi sistem yang kurang relevan dengan sistem PR, seperti misalnya sistem moral yang “membebani” sistem PR dengan makna persaudaraan, kesopanan, maupun ancaman perpecahan.

Sistem PR, yang beradaptasi dengan mengembangkan pemaknaan “harmoni” relasi, justru mengancam keberlangsungan sistem PR. Apakah PR masih berfungsi dalam relasi harmoni? Bukankah fungsi PR akan optimal justru ketika perbedaan dalam relasi tetap ada, tetapi kualitas relasi justru bertumbuh? Kualitas relasi yang dibangun melalui upaya harmonisasi akan rentan mengundang pemaknaan di luar “perbedaan relasi” itu sendiri, seperti komunikasi yang dibangun dari informasi manipulatif agar “seolah-olah” tidak ada lagi perbedaan. Sementara, pada sistem PR yang mengembangkan makna relasi dari perbedaan, mengasumsikan ada banyak iritasi sistem norma terkait kualitas hubungan yang mengacu pada informasi beragam nilai sosial, yang membuat norma menjadi tidak stabil, sehingga sistem PR perlu mengembangkan makna dengan “mengundang” informasi soal kepercayaan untuk memediasi persoalan relasi sosial. “Kepercayaan” menjadi makna yang direferensi oleh sistem PR dari asumsi bahwa perbedaan disebabkan adanya keraguan dan minim pengetahuan, serta melihat masa depan dengan asumsi yang tidak pasti. Referensi sistem PR pada makna kepercayaan ini tentu sulit terjadi dalam situasi yang stabil dan konstan, melainkan dalam situasi yang tidak biasa, tidak dapat diprediksi, maupun menyimpang. Hal inilah yang kemudian membawa refleksi sistem PR pada isu kemandirian dan legitimasi.⁴⁰

Upaya Holmström dalam mengonstruksi realitas tingkat kedua atas PR dapat menjadi salah satu gambaran tentang bagaimana realitas komunikasi dibutuhkan sistem agar selalu relevan dan adaptif. Jika kita menilik pada masalah sosial di sekitar kita, sudah pasti ada sangat banyak kebutuhan refleksi pada sistem-sistem sosial yang ada. Misalnya saja, kita bisa menguji evolusi sistem politik kita yang mengalami masalah soal kekuasaan berlebih (*over power*). Kita lihat bagaimana perkembangan informasi soal kekuasaan berlebih yang tersebar dalam beragam pemberitaan memunculkan kebutuhan mendesak pada refleksi sistem politik kita pada makna etika.

⁴⁰ Holmström, 258–59.

Sebagai contoh, bagaimana kekuasaan berlebih dari Presiden Joko Widodo membuatnya bisa *cawe-cawe* dalam memengaruhi pencalonan presiden yang menguntungkan keluarganya. Pemberitaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah batas usia pencalonan kepala dan wakil presiden untuk meloloskan putra presiden Joko Widodo, cukup menggemparkan dan mengundang makna etika dalam refleksi sistem politik kita. Pertanyaannya, apakah masalah kekuasaan berlebih dapat direduksi cukup dengan pemaknaan etika kekuasaan? Dalam berbagai pemberitaan seputar isu pencalonan putra presiden Joko Widodo terkait etika, informasi tentang pentingnya etika telah mampu menghasilkan pemahaman yang mengaitkan etika politik dengan “delegitimasi” posisi wakil presiden terpilih bukan saja datang dari aspek politik, tetapi juga dari aspek personal, seperti misalnya kasus viralitas akun Fufufafa, dan pendidikan keluarga.

Konsekuensinya, diskursus tentang “kekuasaan berlebih” saat ini lebih memunculkan sentimen personal ketimbang ancaman pada keberlangsungan sistem politik itu sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan dari pertumbuhan pemahaman yang cenderung stagnan tentang risiko kekuasaan yang berlebih. Kemungkinan besar, risiko kekuasaan berlebih, misalnya dalam percakapan di media sosial, ditunjukkan melalui informasi yang membangun makna “penyalahgunaan kekuasaan”. Kita belum banyak mengembangkan komunikasi risiko kekuasaan berlebih melalui informasi-informasi yang menghubungkannya dengan pelemahan kekuasaan publik. Sistem politik saat ini justru merespons masalah kekuasaan berlebih dengan mereferensi-diri soal makna keseimbangan kekuasaan (*balancing power*) dengan mengomunikasikan soal pembatasan-pembatasan kekuasaan. Sementara, risiko dari “berkurangnya kekuasaan publik” belum banyak dikomunikasikan yang menyebabkan delegitimasi publik itu sendiri. Itulah mengapa saat ini jika ditanya soal “mengangnya kenapa kalau publik lemah?”, dengan mudah diiritasi dengan komunikasi yang mengungkapkan informasi seputar “yang penting pemerintahnya kuat” disertai pertumbuhan pemahaman bahwa pemerintah yang kuat akan melindungi masyarakat yang lemah”.

Dengan cara yang sama, kita dapat mengobservasi dari observasi kita atas sistem-sistem sosial lainnya melalui berbagai masalah sosial yang sedang berlangsung. Semakin banyak komunikasi kita ajukan sebagai sistem seleksi informasi, pengungkapan, dan pemahaman dari proses adaptasi sistem, maka semakin sederhana kita membedakan sistem dengan masalahnya. Pada saat bersamaan, kita juga dapat menguji ketahanan sistem dengan memastikan berfungsi atau tidaknya sistem dalam waktu yang lama.

Refleksi: Mereduksi Kompleksitas Informasi

Tulisan ini saya akhiri dengan kembali pada pertanyaan awal tentang relevansi komunikasi di era informasi. Melalui dua diskusi di atas, kita perlu sedikit pertanyaan dengan menekankan pada fungsi komunikasi di era informasi. Sebagai sistem seleksi informasi, pengungkapan, dan pemahaman; berfungsi atau tidaknya komunikasi dapat dilihat dari kemampuannya mereduksi kompleksitas informasi itu sendiri. Kompleksitas informasi dapat muncul dari pemaknaan “kecepatan informasi”, yang datang dari sistem teknologi informasi (TI) melalui berbagai *platform* pencarian maupun *sharing* informasi. Makna “kecepatan informasi” membuat kebutuhan pada industri digital meningkat pesat. Pada saat bersamaan, masalah informasi semakin bertambah, karena siapapun yang menggunakan *platform* digital masuk dalam “aturan main” persebaran atau algoritma informasi yang dipengaruhi oleh industri digital.⁴¹

Pengembangan sistem masyarakat informasi dibangun dengan memaknai informasi pada kuantitasnya, seperti jumlah *views*, *like*, *share*, *virality*,⁴² *engagement*,⁴³ dan kuantifikasi algoritma penilaian lainnya. Melalui algoritma jaringan informasi, sistem diri dari masyarakat informasi memaknai informa-

⁴¹ Christian Fuchs, *Digital Capitalism: Media, Communication and Society Volume Three* (London: Routledge, 2022), <https://doi.org/10.4324/9781003222149>; Ercan Oztemel dan Samet Gursev, “Literature Review of Industry 4.0 and Related Technologies,” *Journal of Intelligent Manufacturing* 31, no. 1 (2020): 127–82, <https://doi.org/10.1007/s10845-018-1433-8>.

⁴² Saleem Alhabash dan Anna R McAlister, “Redefining Virality in Less Broad Strokes: Predicting Viral Behavioral Intentions from Motivations and Uses of Facebook and Twitter,” *New Media & Society* 17, no. 8 (2015): 1317–39, <https://doi.org/10.1177/1461444814523726>; Ji Won Kim, “They Liked and Shared: Effects of Social Media Virality Metrics on Perceptions of Message Influence and Behavioral Intentions,” *Computers in Human Behavior* 84 (2018): 153–61, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.01.030>.

⁴³ Juliet E. Carlisle dan Robert C. Patton, “Is Social Media Changing How We Understand Political Engagement? An Analysis of Facebook and the 2008 Presidential Election,” *Political Research Quarterly* 66, no. 4 (2013): 883–95, <https://doi.org/10.1177/1065912913482758>; Gene Rowe dan Lynn J. Frewer, “A Typology of Public Engagement Mechanisms,” *Science, Technology, & Human Values* 30, no. 2 (2005): 251–90, <https://doi.org/10.1177/0162243904271724>; Feeney, Mary K., Eric Welch, dan Meg Haller, “Social Media, Civic Engagement, and Technology Use in Local Government Agencies: Findings from a National Survey,” IPCE

si sebagai cara baru membangun eksistensi diri. Informasi yang diiritasi oleh sistem diri tersebut mengundang iritasi dari kemampuan teknologi informasi melakukan “jejak digital”. Untuk bisa memonitor jejak digital, masyarakat informasi justru mengintensifkan pola interaksi *human-machine communication* dengan memanfaatkan mesin *big data* dan *artificial intelligence* (AI) yang mampu mendokumentasi secara cepat jejak digital dalam rentang waktu yang cukup panjang.⁴⁴ Era informasi juga rentan dengan disrupsi informasi,⁴⁵ wacana *post-truth*,⁴⁶ dan sebagainya.

Dengan kompleksitas informasi yang mengiringi pengembangan masyarakat informasi, wajar jika sistem seleksi informasi tidak muncul dalam berbagai pengungkapan, karena pemahaman pada kualitas informasi yang berguna/tidak berguna belum berkembang pemaknaannya. Dalam hal ini, sistem komunikasi dapat menyeleksi berguna-tidaknya informasi, salah satunya dari kemampuan sistem informasi mengundang variasi pemahaman atas sebuah informasi. Variasi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan makna atas informasi tertentu dari tahun ke tahun.

Institute for Policy and Civic Engagement Report (Chicago: University of Illinois Chicago, 12 Juni 2012), <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3069940>.

⁴⁴ Zeynep Engin dan Philip Treleaven, “Algorithmic Government: Automating Public Services and Supporting Civil Servants in using Data Science Technologies,” *The Computer Journal* 62, no. 3 (1 Maret 2019): 448–60, <https://doi.org/10.1093/comjnl/bxy082>; Théo Lepage-Richer dan Fenwick McKelvey, “States of Computing: On Government Organization and Artificial Intelligence in Canada,” *Big Data & Society* 9, no. 2 (1 Juli 2022): 20539517221123304, <https://doi.org/10.1177/20539517221123304>.

⁴⁵ Feri Ferdinan Alamsyah dkk., “Exploring the Different Opportunities For Information Diversity in the Digital Disruption Era,” *Rigeo* 11, no. 5 (8 Juni 2021), <https://rigeo.org/menu-script/index.php/rigeo/article/view/759>; Michael James Walsh dan Shannon Jay Clark, “Co-Present Conversation as ‘Socialized Trance’: Talk, Involvement Obligations, and Smart-Phone Disruption,” *Symbolic Interaction* 42, no. 1 (2019): 6–26, <https://doi.org/10.1002/symb.382>.

⁴⁶ Vittorio Bufacchi, “Truth, Lies and Tweets: A Consensus Theory of Post-Truth,” *Philosophy & Social Criticism* 47, no. 3 (1 Maret 2021): 347–61, <https://doi.org/10.1177/0191453719896382>; Stephan Lewandowsky, Ullrich K. H. Ecker, dan John Cook, “Beyond misinformation: Understanding and coping with the ‘post-truth’ era,” *Journal of Applied Research in Memory and Cognition* 6, no. 4 (2017): 353–69, <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>; Silvio Waisbord, “Truth is What Happens to News: On journalism, fake news, and post-truth,” *Journalism Studies* 19, no. 13 (3 Oktober 2018): 1866–78, <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1492881>.

Misalnya saja, dari tahun ke tahun, masalah kebakaran hutan tidak terselesaikan. Artinya, masyarakat informasi mengalami stagnasi informasi karena tidak mampu menghadirkan variasi pemaknaan yang menumbuhkan pemahaman pada solusi kebakaran hutan. Demikian juga jika masalah kemiskinan semakin meningkat, berarti informasi tentang solusi kemiskinan telah diiritasi oleh banyak masalah lain yang tidak ada hubungannya dengan solusi kemiskinan, seperti misalnya pencitraan pejabat atau korupsi. Di sinilah fungsi komunikasi sebagai sistem seleksi dapat diandalkan untuk membedakan informasi yang berguna atau tidak dalam mereduksi masalah sosial.

Dalam kerangka ini, informasi dalam seleksi sistem komunikasi memiliki mekanisme internal untuk menyaring dan menstabilkan makna. Proses seleksi ini bekerja melalui pengulangan, penekanan, atau pengabaian terhadap informasi tertentu yang beredar di ruang publik. Ketika sebuah informasi tidak mampu menghasilkan perkembangan pemaknaan, maka komunikasi sebagai sistem seleksi menjadi tidak optimal. Komunikasi dalam hal ini harus mampu membedakan antara informasi sebagai kebisingan dan informasi yang memiliki kapasitas transformatif.

Oleh karena itu, dalam masyarakat yangibanjiri informasi, tantangan utamanya bukan lagi sekadar memperluas akses, tetapi memperkuat kapasitas seleksi. Variasi pemaknaan atas informasi bukan hanya menunjukkan pluralitas perspektif, tetapi juga menjadi indikator dinamika kesadaran sosial terhadap suatu isu. Dalam konteks ini, komunikasi sebagai sistem seleksi menawarkan cara berpikir baru: bukan hanya tentang apa yang dikatakan dan kepada siapa, tetapi bagaimana informasi diseleksi untuk kemudian diungkapkan dan mentransformasikan pemahaman.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, S.IP., M.Si. dan Dr. Rahayu, M.Si., M.A. atas bimbingan yang sangat berharga dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih pada Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atas dukungan dan kesempatan yang memungkinkan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, Feri Ferdinan, Dian Wardiana Sjuchro, Siti Karlinah, dan Herlina Agustin. “Exploring the Different Opportunities For Information Diversity in the Digital Disruption Era.” *Rigeo* 11, no. 5 (8 Juni 2021). <https://rigeo.org/menu-script/index.php/rigeo/article/view/759>.
- Alhabash, Saleem, dan Anna R McAlister. “Redefining Virality in Less Broad Strokes: Predicting Viral Behavioral Intentions from Motivations and Uses of Facebook and Twitter.” *New Media & Society* 17, no. 8 (2015): 1317–39. <https://doi.org/10.1177/1461444814523726>.
- Arnoldi, Jakob. “Sense making as communication.” *Soziale Systeme* 16, no. 1 (2010): 28–48. <https://doi.org/10.1515/sosys-2010-0103>.
- Bausch, Kenneth C. “The Habermas/Luhmann Debate and Subsequent Habermasian Perspectives on Systems Theory.” *Systems Research and Behavioral Science* 14, no. 5 (1997): 315–30. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1743\(199709/10\)14:5<315::AID-SRES173>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1743(199709/10)14:5<315::AID-SRES173>3.0.CO;2-Z).
- Bufacchi, Vittorio. “Truth, Lies and Tweets: A Consensus Theory of Post-Truth.” *Philosophy & Social Criticism* 47, no. 3 (1 Maret 2021): 347–61. <https://doi.org/10.1177/0191453719896382>.
- Carlisle, Juliet E., dan Robert C. Patton. “Is Social Media Changing How We Understand Political Engagement? An Analysis of Facebook and the 2008 Presidential Election.” *Political Research Quarterly* 66, no. 4 (2013): 883–95. <https://doi.org/10.1177/1065912913482758>.
- Castells, Manuel. *The Information Age, Volume I: The Rise of the Network Society*. Malden: Blackwell, 1996.
- Cohen, Amy J. “Producing Publics: Dewey, Democratic Experimentalism, and the Idea of Communication.” *Contemporary Pragmatism* 9, no. 2 (21 April 2012): 143–57. <https://doi.org/10.1163/18758185-90000234>.
- Dewey, John. *The Public and Its Problems: An Essay in Political Inquiry*. Athens: Swallow Press, 2016.
- Elder-Vass, Dave. “Luhmann and Emergentism: Competing Paradigms for Social Systems Theory?” *Philosophy of the Social Sciences* 37, no. 4 (1 Desember 2007): 408–32. <https://doi.org/10.1177/0048393107307660>.
- Engin, Zeynep, dan Philip Treleaven. “Algorithmic Government: Automating Public Services and Supporting Civil Servants in using Data Science Technologies.” *The Computer Journal* 62, no. 3 (1 Maret 2019): 448–60. <https://doi.org/10.1093/comjnl/bxy082>.
- Feng, Yang, Chen Huan, dan Qian Kong. “An expert with whom I can identify: the role of narratives in influencer marketing.” *International Journal of Advertising* 40, no. 7 (3 Oktober 2021): 972–93. <https://doi.org/10.1080/02650487.2020.1824751>.
- Fiske, John. *Introduction to Communication Studies*. 3 ed. London: Routledge, 2010. <https://doi.org/10.4324/9780203837382>.

- Fuchs, Christian. *Digital Capitalism: Media, Communication and Society Volume Three*. London: Routledge, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003222149>.
- Fuchs, Christian, dan Wolfgang Hofkirchner. "Autopoiesis and Critical Social Systems Theory." Dalam *Autopoiesis in Organization Theory and Practice*, disunting oleh Rodrigo Magalhães dan Ron Sanchez, 111–29. Bingley: Emerald, 2009.
- Gillespie, Tarleton. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven: Yale University Press, 2018.
- Feeney, Mary K., Eric Welch, dan Meg Haller. "Social Media, Civic Engagement, and Technology Use in Local Government Agencies: Findings from a National Survey." IPCE Institute for Policy and Civic Engagement Report. Chicago: University of Illinois Chicago, 12 Juni 2012. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3069940>.
- Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, 1984.
- . "Towards a theory of communicative competence." *Inquiry* 13, no. 1–4 (1970): 360–75. <https://doi.org/10.1080/00201747008601597>.
- Hill, Richard, "The Coming of Post Industrial Society," *Insurgent Sociologist* 4, no. 3 (1974): 37–51.
- Holmström, Susanne. "Niklas Luhmann: Contingency, Risk, Trust and Reflection." *Public Relations Review* 33, no. 3 (2007): 255–62. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2007.05.003>.
- Kim, Ji Won. "They Liked and Shared: Effects of Social Media Virality Metrics on Perceptions of Message Influence and Behavioral Intentions." *Computers in Human Behavior* 84 (2018): 153–61. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.01.030>.
- Lasswell, Harold D. "The Structure and Function of Communication in Society." Dalam *The Communication of Ideas: A Series of Addresses*, disunting oleh Lyman Bryson, 37–51. New York: Institute for Religious and Social Studies, 1948.
- . "The Structure and Function of Communication in Society." *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi*, no. 24 (2007): 215–28.
- Lee, Daniel. "The Society of Society: The Grand Finale of Niklas Luhmann." *Sociological Theory* 18, no. 2 (1 Juli 2000): 320–30. <https://doi.org/10.1111/0735-2751.00102>.
- Lepage-Richer, Théo, dan Fenwick McKelvey. "States of Computing: On Government Organization and Artificial Intelligence in Canada." *Big Data & Society* 9, no. 2 (1 Juli 2022): 20539517221123304. <https://doi.org/10.1177/20539517221123304>.

- Lewandowsky, Stephan, Ullrich K. H. Ecker, dan John Cook. “Beyond misinformation: Understanding and coping with the ‘post-truth’ era.” *Journal of Applied Research in Memory and Cognition* 6, no. 4 (2017): 353–69. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>.
- Littlejohn, Stephen W., dan Karen A. Foss. *Theories of Human Communication: Tenth Edition*. Long Grove: Waveland Press, 2010.
- Luhmann, Niklas. *Introduction to Systems Theory*. Disunting oleh Dirk Baecker. Diterjemahkan oleh Peter Gilgen. Cambridge: Polity, 2013.
- . *Social Systems*. Stanford: Stanford University Press, 1995.
- Ma, Xiaoyu, dan Xu Fan. “A Review of the Studies on Social Media Images from the Perspective of Information Interaction.” *Data and Information Management* 6, no. 1 (1 April 2022): 100004. <https://doi.org/10.1016/j.dim.2022.100004>.
- Neves, Marcelo. “From the Autopoiesis to the Allopoiesis of Law.” *Journal of Law and Society* 28, no. 2 (2001): 242–64. <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00188>.
- Oztemel, Ercan, dan Samet Gursev. “Literature Review of Industry 4.0 and Related Technologies.” *Journal of Intelligent Manufacturing* 31, no. 1 (2020): 127–82. <https://doi.org/10.1007/s10845-018-1433-8>.
- Prier, Jarred. “Commanding the trend: Social media as information warfare.” Dalam *Information Warfare in the Age of Cyber Conflict*. London: Routledge, 2020.
- Rowe, Gene, dan Lynn J. Frewer. “A Typology of Public Engagement Mechanisms.” *Science, Technology, & Human Values* 30, no. 2 (2005): 251–90. <https://doi.org/10.1177/0162243904271724>.
- Sapienza, Zachary S., Iyer, Narayanan, dan Aaron S. and Veenstra. “Reading Lasswell’s Model of Communication Backward: Three Scholarly Misconceptions.” *Mass Communication and Society* 18, no. 5 (3 September 2015): 599–622. <https://doi.org/10.1080/15205436.2015.1063666>.
- Schultz, Friederike, Sonja Utz, dan Anja Göritz. “Is the Medium the Message? Perceptions of and Reactions to Crisis Communication via Twitter, Blogs and Traditional Media.” *Public Relations Review* 37, no. 1 (1 Maret 2011): 20–27. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2010.12.001>.
- Tellis, Gerard J., Deborah J. MacInnis, Seshadri Tirunillai, dan Yanwei Zhang. “What Drives Virality (Sharing) of Online Digital Content? The Critical Role of Information, Emotion, and Brand Prominence.” *Journal of Marketing* 83, no. 4 (1 Juli 2019): 1–20. <https://doi.org/10.1177/0022242919841034>.
- Vanderstraeten, Raf. “Parsons, Luhmann and the Theorem of Double Contingency.” *Journal of Classical Sociology* 2, no. 1 (1 Maret 2002): 77–92. <https://doi.org/10.1177/1468795X02002001684>.

- Vásquez, Consuelo, dan Rubén Dittus Benavente. "Revisiting Autopoiesis: Studying the Constitutive Dynamics of Organization as a System of Narratives." *Management Communication Quarterly* 30, no. 2 (1 Mei 2016): 269–74. <https://doi.org/10.1177/0893318915620492>.
- Waisbord, Silvio. "Truth is What Happens to News: On journalism, fake news, and post-truth." *Journalism Studies* 19, no. 13 (3 Oktober 2018): 1866–78. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1492881>.
- Walsh, Michael James, dan Shannon Jay Clark. "Co-Present Conversation as 'Socialized Trance': Talk, Involvement Obligations, and Smart-Phone Disruption." *Symbolic Interaction* 42, no. 1 (2019): 6–26. <https://doi.org/10.1002/symb.382>.

Nur Imroatus Sholikhah merupakan lulusan Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Magister Kajian Budaya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Profesi sehari-hari adalah konsultan Komunikasi Publik Era Digital untuk beberapa institusi pemerintahan, BUMN, korporasi, dan NGO. Fokus utamanya mengembangkan kajian komunikasi digital dan metodologi ilmu sosial berbasis *Big Data* dan *Artificial Intelligence* (AI). Ia juga mengajar sebagai dosen praktisi pada mata kuliah "Analisis Big Data dan Media Sosial" di Departemen Ilmu Komunikasi Gadjah Mada, serta menjadi dosen tamu di beberapa universitas.